Pansus Pertambangan DPRD Kaltim Tegaskan 21 IUP Bertandatangan Gubernur Kaltim Palsu

written by Admin | November 9, 2022

Samarinda, *biwara.co* – Panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim menyampaikan hasil kerja pansus dalam beberapa bulan terakhir.

21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertandatangan Gubernur Kaltim Isran Noor, dinyatakan palsu.

Menurut Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan, M Udin, kesimpulan tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, di mana akhirnya dinyatakan ke-21 IUP itu tidak terdaftar.

“Berkaitan dengan 21 IUP itu DPMPTSP menegaskan bahwa 21 itu palsu. Cuma mereka belum bisa memastikan apakah tanda tangan

gubernur itu asli atau tidak," ungkal Udin sapaannya, Rabu (9/11/2022).

"Kalau tanda tangan gubernur itu asli, berarti gubernur harus mengklarifikasi. Kalau itu palsu gubernur harus melaporkan ke aparat penegak hukum terkait pemalsuan," sambungnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, Pansus juga telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim. Ia membeberkan bahwa salah satu perusahaan yang masuk dalam 21 IUP tersebut berada di Penajam Paser Utara.

"Dan kemarin juga saat pengembang di RDP, ada beberapa IUP yang sudah beroperasi tepatnya ada di Penajam. Kita klarifikasi dengan ESDM, mereka sudah sidak ke sana tetapi dilarang masuk. Perusahaan mengatakan memiliki izin resmi, tetapi masuk 21 IUP (diduga palsu) tersebut," jelasnya.

Udin mengatakan, sebagai langkah lanjutan Pansus akan kembali memanggil pemilik perusahan yang ada di Kaltim berkaitan dengan CSR, reklamasi dan jamrek (jaminan reklamasi).

Tidak hanya itu, Pansus Investigasi Pertambangan, katanya, juga akan melakukan RDP terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

"Kami akan panggil perusahaan (tambang) di Kaltim. Banyak hal yang ingin kita konfirmasi secara langsung," pungkasnya. ***(Nyi/Adv/DprdKaltim)***